

DAMPAK KEBIJAKAN LAND REFORM TERHADAP PINJAMAN LUAR NEGERI ZIMBABWE KEPADA IMF TAHUN 2008

Oleh : Medriamel

(email : medriamel@yahoo.com)

Dosen Pembimbing : Drs. Syafri Harto, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau-Pekanbaru

Kampus Bina Widya JL.HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293

Bibliografi :

6 Buku, 5 Jurnal dan Working Papers, 2 dokumen Resmi, 17 Website

Abstract

This is a political economic studies in international relations which describes about the impact of land reform policies towards foreign loans to the IMF in 2008. Robert Mugabe's land reform policies have a negative impact on the economy in Zimbabwe. Land reform policy are made to take land owned by white farmers forcibly and given to supporters political party of Robert Mugabe. Land reform policies decrease economic growth and suffered hyperinflation and the result IMF suspended aid to Zimbabwe's foreign loans.

This research purpose to explain the impact of land reform policies towards foreign loans to the IMF in 2008 and describes the effect on the economy Zimbabwe, the object of this study is the policy of land reform in Zimbabwe. This is qualitative research which used descriptive methods, and collecting data from books, journals, official publications and relevant websites. This paper used the behavioralist perspective and international economic cooperation theory proposed by Anne Kruenger, Deepak Lal.

The result of this research shows that Hyperinflation in Zimbabwe bring bad influence on society and the IMF decided to make economic aid to Zimbabwe Zimbabwe is getting worse. However zimbabwe tried to grow by making changes such as dollarization, and use of loan funds to effectively lead the IMF to revoke suspension of aid funds to Zimbabwe.

Keyword : Land Reform Policy , IMF, Economic of Zimbabwe

Pendahuluan

Setelah mencapai kemerdekaannya pada tahun 60-an, negara-negara Afrika mulai membenahi dirinya dengan melakukan pembenahan disegala lini. Usaha ini belum bisa mencapai tahap maksimal, karena

memang kenyataannya negara-negara Afrika masih membutuhkan bantuan dari luar dalam bentuk bantuan pemerintahan, bantuan ekonomi, dan bantuan militer. Dalam hal perbaikan ekonomi, usaha tersebut ditandai dengan masuknya Negara- negara Afrika ke dalam

keanggotaan IMF pada tahun 1990-an, seperti ; Nigeria, Gambia, Mauritania, Sierra Leone, Afrika Selatan, Zimbabwe, Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Rwanda, Republik Kongo, Tanzania, dan Uganda serta secara bertahap diikuti negara-negara Afrika lainnya.

Zimbabwe adalah negara berbentuk republik dengan sistem pemerintahan semi presidensial, dimana presiden merupakan Kepala Negara dan juga sebagai Kepala Pemerintahan. Dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah dan kekuasaan legislatif dibagi antara pemerintah dan parlemen. Zimbabwe dibawah pemerintahan Presiden Robert Mugabe.

Implementasi *majority rule*, kulit putih memegang peran dominan dalam ekonomi bangsa. Dengan jumlah populasi sekitar 1% dari seluruh populasi penduduk Zimbabwe, kulit putih memegang sekitar 70% tanah yang subur, dan 82% diantaranya dibeli setelah kemerdekaan Zimbabwe. Namun, petani kulit putih tidak punya kekuatan politik, melihat ini Robert Mugabe memiliki kesempatan untuk merebut tanah-tanah petani kulit putih dengan cara memberlakukan kebijakan *land reform* yang berarti pembersihan tanah-tanah milik petani kulit putih secara paksa dan dibagikan kepada pendukung politiknya yang tidak memiliki keterampilan dan teknologi dalam mengelola tanah tersebut dan menyebabkan kenaikan harga yang sangat tajam pada komoditas pertanian seperti jagung dan padi,

serta runtuhnya ekonomi Zimbabwe. Padahal semula Zimbabwe merupakan eksportir pangan yang penting di wilayah tersebut. Hal yang terjadi selanjutnya adalah jatuhnya produktivitas, meningkatnya jumlah pengangguran serta tingkat inflasi yang meningkat sangat tajam.

Kebijakan *land reform* membawa pengaruh yang sangat besar bagi Zimbabwe karena turunnya nilai ekonomi yang berkelanjutan sehingga menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan akhirnya hiperinflasi terbesar terjadi pada tahun 2008. Akibatnya banyak lembaga-lembaga internasional yang mencabut pinjaman luar negerinya terhadap Zimbabwe seperti IMF. IMF mencabut bantuan dananya kepada Zimbabwe saat Zimbabwe mengalami Hiperinflasi pada tahun 2008.

KERANGKA TEORI

1. Unit Analisa dan Perspektif

Penelitian ini mengacu kepada Perspektif behavioralis yang melihat suatu lembaga atau negara dari aktor-aktor yang menjalankan lembaga tersebut. Yang menjadi acuan adalah aktor bukan lembaga atau negaranya. Aktor bisa berupa individu atau kelompok. Contohnya saja jika menganalisis negara, behavioralis lebih melihat sikap atau perilaku penguasa tersebut dalam menjalankan lembaganya seperti merumuskan kebijakan dan undang-undang. Jadi lembaga bukanlah titik sentral dalam pembahasan behavioralis, melainkan perilaku dan perilaku tidak sebatas perorangan saja, tetapi juga mencakup kesatuan yang lebih besar, seperti

organisasi kemasyarakatan, kelompok, elit, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik.¹

Behavioralis menyatakan bahwa negara adalah pembuat kebijakan (*decision makers*) yang artinya negara merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab membuat kebijakan di negara tersebut. Keberadaan aktor negara seperti *kepala negara*, dinilai sebagai aktor utama pembuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat seharusnya dapat menaikkan nilai ekonomi suatu negara dan mencegah terjadinya penurunan perekonomian.

Selanjutnya mengenai unit analisa penulis menggunakan unit analisis individu yang menyatakan bahwa fenomena hubungan internasional pada akhirnya adalah akibat dari perilaku individu-individu yang saling berinteraksi. Karena itu, untuk memahami hubungan internasional diharuskan untuk menelaah sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat kebijakan²

2. Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori yang digunakan adalah teori pembuatan kebijakan luar negeri yang di usung oleh Lloyd Jensen. Teori ini menjelaskan lima model proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu; model rasional/ model strategik, pembuatan keputusan, politik birokrasi, model adaptif, dan model incremental (penambahan-penambahan). Dalr kelima model

dari teori pembagian pembuatan kebijakan luar negeri, penulis memilih model politik birokrasi. Model ini menekankan pada peranan (*role played*) yang dilakukan banyak birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri, dan tidak memfokuskan perhatiannya hanya pada pusat pembuat keputusan politik luar negeri suatu negara. Dengan demikian, para birokrat memiliki banyak pengaruh dalam merumuskan politik luar negeri. Para birokrat juga bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga mereka dapat mempengaruhi implementasi politik luar negerinya. Namun demikian peran birokrat ini tidak bisa dibesar-besarkan karena keterbatasan pengaruhnya.³

Pada model ini pemerintah dianggap terdiri dari sekian banyak individu dan organisasi. Konsekwensi yang muncul adalah keputusan tidaklah dipandang sebagai produk rasionalitas melainkan prosuk dari proses interaksi dan penyesuaian dari berbagai individu dan organisasi. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan proses politik yang meliputi rundingan-rundingan (*bargaining*), kompromi (*compromise*), dan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*).

Kebijakan land reform zimbabwe yang diberlakukan oleh Robert Mugabe dalam menjalankan pemerintahan dianggap sebagai

¹. Mohtar Mas' oed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES. hal 75

² Mochtar Mas' oed. Ibid. Hal. 177-178

³ Yanyan mochmmad Yani. Perspektif-perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan praksis, Tersedia di http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri_.pdf, Diakses 23 Januari 2016

mauver yang ekstrem dan tanpa memikirkan konsekuensi yang ditimbulkan akibat perampasan tanah-tanah petani kulit putih secara paksa dan mengakibatkan perekonomian di Zimbabwe melemah sehingga terjadi hiperinflasi pada tahun 2008. Dan akhirnya IMF mencabut dana bantuannya kepada Zimbabwe.

Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Kebijakan Land Reform terhadap Perekonomian Zimbabwe

Setelah Robert Mugabe berhasil melakukan kebijakan Land Reform. Banyak petani kulit putih yang bermigrasi dan keluar dari negara Zimbabwe karena tidak adanya kekuatan politik. Akibat diberlakukannya kebijakan Land Reform, Zimbabwe mengalami beberapa dampak yang sangat buruk dalam bidang ekonomi karena banyaknya lahan-lahan tanah yang tidak dikelola secara benar.

1.1 Penurunan Mata Uang Nasional (Dollar Zimbabwe)

Kekeringan yang melanda Afrika bagian selatan, mungkin bisa disebut yang terburuk di abad ini, sangat mempengaruhi Zimbabwe dan dinyatakan sebagai bencana nasional. Bantuan IMF justru menambah kesulitan yang mendalam. Dengan implementasi *majority rule*, kulit putih memegang peran dominan dalam ekonomi bangsa. Dengan jumlah populasi sekitar 1% dari seluruh populasi penduduk Zimbabwe, kulit putih memegang sekitar 70% tanah yang subur, dan 82% diantaranya dibeli setelah kemerdekaan Zimbabwe. Namun,

orang kulit putih tidak punya kekuatan politik. Redistribusi tanah dari kulit putih muncul kembali sebagai isu politik pada permulaan tahun 1999.⁴

Isu terbaru yang timbul di Zimbabwe adalah pergantian mata uang Zimbabwe yang dimulai sejak Agustus 2006. Pergantian itu terletak pada penghilangan 3 angka nol (ribuan) pada setiap nominal atau dikenal dengan istilah *redenominasi*. Misalkan semula ada uang bernilai 85.000 maka pada mata uang yang baru bernilai 85. Pergantian mata uang ini dimaksudkan untuk membantu menghentikan laju tingkat inflasi yang semakin tidak terkendali. Penduduk Zimbabwe diberi waktu 21 hari untuk menukarkan uangnya dengan mata uang yang baru sampai 21 Agustus 2006.⁵

1.2 Terjadinya Hiperinflasi di Zimbabwe

Zimbabwe mengalami hiperinflasi yang dapat dilihat dari kenaikan harga barang dan jasa yang terus-menerus secara umum. Hal ini sejalan dengan dengan konsep inflasi. Faktor pendorong lainnya, yakni ketidakmampuan pemerintah membayar gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah besar. Selain itu, karena sumber-sumber dana dalam negeri tidak mampu membiayai seluruh pembiayaan pembangunan, terutama masih rendahnya tabungan pemerintah.

Seperti yang diketahui, perekonomian Zimbabwe terus mengerucut setiap tahunnya dalam satu dekade terakhir. Hal tersebut

⁴Stephen Chan. 2003. *Robert Mugabe: A Life of Power and Violence*. Hal. 127

⁵Ibid

disebabkan adanya pengambil-alihan lahan pertanian oleh Presiden Robert Mugabe yang dimiliki oleh warga asing kulit putih di negara itu. Hal ini disebabkan karena kebijakan *land reform* Mugabe, yang mendistribusikan tanah untuk para pendukung politiknya yang tidak memiliki tanah yang efisien. Pada akhirnya, kondisi itu menyebabkan pasokan bahan pangan dan kenaikan harga yang sangat tajam pada komoditas pertanian sehingga mengakibatkan pertukaran mata uang asing kian menyusut.

Hal yang terjadi selanjutnya adalah jatuhnya produktivitas, meningkatnya jumlah pengangguran serta tingkat inflasi yang meningkat. Dengan demikian, pada tahun 2007, perekonomian negara tersebut menurun hingga 40%.

Penyebab hal ini adalah pengelolaan ekonomi yang buruk oleh Presiden Mugabe. Gejolak politik dan sosial telah mengacaukan Zimbabwe. Hal yang dilakukan oleh pemerintahan Mugabe untuk mempertahankan kekuasaannya adalah mencetak uang secara besar-besaran. Uang dipakai untuk membayar gaji pegawai, tentara, dan belanja pemerintah. Uang beredar pun tumbuh tak terkendali menjadi akar dari hiperinflasi. Menghadapi masalah yang timbul, Mugabe justru memerintahkan bank sentral Zimbabwe untuk terus mencetak uang. Bank Sentral Zimbabwe adalah kementerian yang berada di bawah kekuasaannya. Gubernur Bank Sentral Zimbabwe, Dr Gideon Gono, dengan sendirinya patuh pada perintah Mugabe. Dengan uang beredar yang meningkat berkali lipat, inflasi terus menanjak.

Kemerosotan ekonomi ini merupakan gambaran dari runtuhnya sendi utama ekonomi di bidang pertanian. Hal itu terjadi menyusul maraknya perampasan ladang pertanian dari sejumlah warga kulit putih. Mugabe mengklaim perampasan ladang pertanian yang dimulai tahun 2002 itu untuk menyejahterahkan warga kulit hitam yang miskin. Namun, kenyataannya sebagian besar ladang yang dirampas diserahkan ke kalangan loyalis Mugabe.

1.3 Penghentian Pinjaman oleh IMF

Setelah Zimbabwe mengalami hiperinflasi beberapa organisasi internasional menghentikan pinjaman luar negeri kepada Zimbabwe termasuk IMF. IMF menghentikan bantuan dana kepada Zimbabwe karena penurunan ekonomi yang sangat merosot tajam. IMF memberikan suspensi pemberian bantuan teknis kepada Zimbabwe yang mana dihentikan pada tahun 2008. Zimbabwe merupakan negara yang memiliki utang luar negeri pada negara-negara sahabat maupun organisasi internasional. Namun, yang dibahas dalam skripsi ini pada organisasi internasional, diantaranya ; Paris Club, Non-Paris Club, IMF, AfDB, WB, EIB, dan lain-lain (organisasi internasional yang tak disebut). Adapun yang lebih fokusnya hanya pada IMF. Berikut daftar utang luar negeri Zimbabwe tahun 2007-2011 dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut ;⁶

⁶IMF and Zimbabwe. 2012. Article IV Consultation- Debt Sustainability Analysis. www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/pdf/2012/

Tabel 1. Total Pinjaman Luar Negeri Zimbabwe

No.	Organisasi Internasional	Jumlah Utang dalam Jutaan USD (2007)	Jumlah Utang dalam Jutaan USD (2008)	Jumlah Utang dalam Jutaan USD (2009)	Jumlah Utang dalam Jutaan USD (2010)
1.	IMF	-	-	133	138
2.	AfDB	-	-	382	382
3.	WB	-	-	339	339
4.	EIB	-	-	305	305
5.	Paris Club	-	-	2.680	3.511
6.	Non-Paris Club	-	-	428	428
7.	Lain-lain	-	-	188	188
	Total	-	-	5.700	8.891

Sumber : Laporan tahunan *International Monetary Fund* pada Artikel Konsultasi IV untuk Zimbabwe tahun 2012.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2007-2009 lembaga-lembaga internasional menghentikan pemberian utang luar negeri. Hal ini dikarenakan padad tahun-tahun tersebut Zimbabwe mulai mengalami Hiperinflasi sehingga tak diberi utang oleh lembaga-lembaga internasional. Zimbabwe tetap dalam kesulitan utang dengan utang luar negeri dari berbagai organisasi internasional maupun non-organisasi internasional. Keuangan publik berada di bawah tekanan pada tahun 2008.

2. Perekonomian Zimbabwe setelah Pemberhentian Pinjaman oleh IMF

Perekonomian Zimbabwe mengalami penurunan yang sangat tajam karena mengalami hiperinflasi pada tahun 2008. Tetapi beberapa cara dilakukan Zimbabwe untuk

memulihkan kembali sektor perekonomiannya dan mengambil kembali perhatian Organisasi

Internasional seperti IMF untuk mencabut suspensi bantuan dana dari IMF.

2.1 Mengalakan Kebijakan

Dolarisasi
Zimbabwe resmi menjalankan kebijakan "dolarisasi" dengan membayar tentara dan pegawai negeri dengan dolar AS pada tahun 2009. Langkah ini dilakukan karena tahun 2008 inflasi mencapai 231 juta persen. Kebijakan 5.700 dolarisasi ini dilakukan pemerintah Zimbabwe sebagai langkah pertama untuk mengatasi masalah di bidang ekonomi. Bahkan, sekitar 130 ribu aparatur pemerintah akan menerima gaji dalam bentuk dolar AS.⁷

Pemerintah Zimbabwe menghapus keharusan toko meminta izin untuk berbisnis dalam dolar AS. Dengan langkah ini, maka dolar AS dan rand (mata uang Afrika Selatan yang cukup kuat pengaruhnya) akan dipakai toko-toko. Sebelum kebijakan ini muncul, warga Zimbabwe sudah tidak ingin menggunakan mata uang lokal. Sopir bus misalnya, menuntut karcis dibayar dengan dolar AS atau rand. Bahkan *Koran Harian Herald* (koran zimbabwe yang dikendalikan oleh pemerintah) sudah mencetak tulisan "harga US\$1" di halaman depannya.

2.2 Pemanfaatan Dana Pinjaman Secara Efektif

⁷Nurkhoiri. 2009.
<http://www.edu.co/read/news/2009/02/19/119160931/Lawan-Inflasi-Zimbabwe-Lakukan-Dolarisasi>. Diakses pada 17 januari 2016, pukul 13:03 wib

Pemerintah Zimbabwe berusaha untuk mengefisienkan pinjaman dana (utang luar negeri) dengan penggunaan yang fokus dan efektif untuk mendanai belanja produktif pemerintah yang memiliki efek stimulus terhadap laju perekonomian. Alokasi untuk belanja modal merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar lagi. Utang yang dibayar mahal dari uang pembayar pajak akan menjadi percuma jika hanya disirkulasikan untuk gaji pegawai negeri sipil yang tinggi ataupun subsidi, apalagi kalau sampai diselewengkan (korupsi). Pemanfaatan utang secara efektif juga berarti ditandai dengan serapan yang optimal oleh penggunaannya karena setiap sen utang yang tidak dimanfaatkan akan tetap membebani anggaran dengan bunga yang terus berjalan.

Pengawasan terhadap penggunaan utang dilakukan secara efisien. Jika dulu tidak pernah jelas jumlah dan penggunaannya, saat ini anggaran yang ada diawasi oleh internal auditor independen (pemerintah), masyarakat, LSM, pengamat pun bebas mengontrol dan mengetahui penggunaan utang yang selalu *diupdate* dalam website, dengan kata lain adanya transparansi dalam pemakaiannya. Sehingga utang yang dimiliki bisa digunakan untuk membangun berbagai hal yang mempunyai manfaat ekonomi yang lebih besar dari nilai utang.

Strategi jangka panjang kebijakan pengelolaan utang pemerintah sendiri menggariskan bahwa pembiayaan pembangunan akan semakin mandiri karena lebih dependen kepada kekuatan ekonomi domestik. diperlukan strategi

pengelolaan utang yang tepat, bertanggung jawab, dapat dilaksanakan, dan terukur yang dijabarkan dalam strategi pengelolaan utang jangka menengah dan program pembiayaan tahunan serta diikuti oleh pengukuran kinerja yang tepat. Bagaimanapun, saat ini utang memiliki peran yang cukup besar dalam penyusunan anggaran negara akibat banyaknya keterkaitan utang. Karena itu, perlu dilakukan pengelolaan utang yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pembiayaan anggaran negara dengan biaya yang rendah dan risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

2.2 Dicabutnya Suspensi Bantuan Dana dari IMF

Pada tahun 2009, Mugabe akhirnya menyetujui untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok oposisi *Movement for Democratic Change* (MDC). Tingkat inflasi di Zimbabwe mengalami perlambatan pada tahun 2009. Hal ini terjadi setelah negara tersebut tidak lagi menggunakan dollar Zimbabwe dan menggantikannya dengan mata uang Afrika Selatan (rand) dan dollar AS. Zimbabwe lebih membuka diri dan mulai melakukan negosiasi dengan IMF dan badan dana dunia lainnya untuk mendapatkan pinjaman. Oleh sebab itu, pada tahun 2009, IMF mencabut suspensi pemberian bantuan teknis kepada Zimbabwe. Namun membantu negara tersebut dengan sejumlah nasihat terkait kebijakan pajak, sistem pembayaran dan supervisi perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi Adnan. 2008. *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. Bandung : CV.Angkasa.
- Bagong Suyanto, "Metode Penelitian Sosial", Berbagai Alternatif Pendekatan. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011). Hal.51
- Barratut
Taqiyyah.2009.<http://internasional.kontan.co.id/news/imf-perekonomian-zimbabwe-bakal-rebound-tahun-ini>. Diakses pada 24 Januari 2016 pukul 16:22 wib.
- Bekezela Ncube, Khetiwe Richards, Joshua Yau, DR.G.Gono. 2012. *Republik Zimbabwe, Pernyataan Kebijakan Moneter*. Harare : Reserve Bank of Zimbabwe
- BPS.2010.Konsep dan Definisi Inflasi.<http://babel.bps.go.id/index.php/20100118339/Inflasi/kondepinflasi.html>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2016, pukul 12:30 wib.
- CIA-The World Factbook. 2013. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html>. Diakses pada 10 februari 2016, pukul 15:28 wib.
- Dyah Ayu Aprilina. 2012. Penyebab Inflasi Zimbabwe. <http://www.search-document.com/doc/1/8/penyebab-inflasi-zimbabwe.html#>. Diakses pada 12 Januari 2016, pukul 10: 39 wib.
- Gray, J. A. (1956). "A Country in Search of a Name". The Northern Rhodesia Journal 3 (1): 78. Parson, pp. 292.
<http://www.nrzam.org.uk/nrj/v3n1/ejournal.htm>. Diakses 18 Februari 2016
- Herdiawan.2009.<http://www.ejournal.unisma.net/ojs/index.php/jrak/article/download/62/60.pdf>. Diakses pada 24 Januari 2016 pukul 17:27 wib
- Istik.2008.<http://finance.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/03/time/164057/idnews/888471/idkanal/4>. Diakses 17 januari 2016 pukul 15:30 wib
- IMF (Internasional Monetary Fund). 2006. *IMF Dalam Fokus*. Washington, D.C : IMF.
- IMF, Zimbabwe staff report for the 2012 article IV consultation-debt sustainability analysis.20012. www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/pdf/2012/dsacr12279.pdf. Diakses pada 12 januari 2016, pukul 15;39 wib
- IMF. 2010. *Poor in Africa*. <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/poor.htm>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 21.09 wib.
- Mohtar Mas'oed. 1994. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mohtar Mas'oed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES.

M.Saeri, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol.3,No.2,
<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/70/64>. Diakses 18 Februari 2016

Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Tersedia di http://file.upi.edu/Direktori/fbe/prodi_manajemen_fbeb/196006021986011-suryana/file__7.pdf. Diakses 23 Januari 2016

Stephen Chan. 2003. *Robert Mugabe: A Life of Power and Violence*.

Yanuar Ikbar. 2007. *Ekonomi Politik Internasional 2, implementasi Konsep dan Teori..* Bandung : PT. Refika Aditama